



Kecak
Bali
Vol.4/2024

KECAK BALI

Keadaan Cakrawala Bali

REALISASI

APBN

SARBAGITA

Triwulan III Tahun 2024

**Menghadapi Tantangan
Next Treasury Melalui
Revitalisasi Tugas Unit
Kepatuhan Internal**



**Reviu Pelaksanaan Anggaran
KPPN Denpasar
Periode Semester I Tahun 2024**

**Platform Pembayaran
Pemerintah**



SEKAPUR SIRIH

Kepala KPPN Denpasar Trimo Yulianto

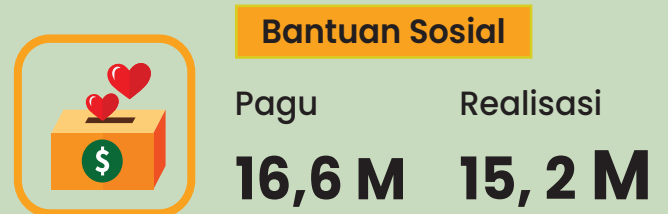
Buletin KECAK BALI (KEadaan CAKrawala BALI) Volume 4 Tahun 2024 kembali hadir menyajikan informasi seputar APBN dan Transfer ke Daerah yang dilaksanakan oleh KPPN Denpasar sebagai *Treasury Operation* dan *Financial Advisor*.

Beberapa informasi pada Buletin KECAK BALI Volume 4 Tahun 2024 antara lain Realisasi APBN periode Triwulan III Tahun 2024, Menghadapi Tantangan *Next Treasury* Melalui Revitalisasi Tugas Unit Kepatuhan Internal, Reviu Pelaksanaan Anggaran KPPN Denpasar Periode Semester I Tahun 2024, dan Platform Pembayaran Pemerintah.

Informasi yang disajikan kiranya dapat memberikan pemahaman terhadap kontribusi dan peran KPPN Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) dan mewujudkan layanan perbendaharaan yang cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan tanpa biaya.

Realisasi Belanja Wilayah SARBAGITA

Periode Triwulan III Tahun 2024



Realisasi Transfer ke Daerah Periode Triwulan III Tahun 2024

Dana Alokasi Umum (DAU)

Pagu Realisasi

4 T 3 T

Dana Bagi Hasil (DBH)

Pagu Realisasi

370 M 210 M

DAK Fisik

Pagu Realisasi

254 M 128 M

DAK non Fisik

BOSP

Pagu Realisasi

755 M 736 M

BOK Puskesmas

Pagu Realisasi

39 M 20 M

DAK Non Fisik Lainnya

Pagu Realisasi

678 M 421 M



Dana Desa

Pagu Realisasi

270 M 262 M



Insentif Fiskal

Pagu Realisasi

189 M 141 M



REKAM PERISTIWA

11 Juli 2024

**Pemantauan dan Evaluasi Unit
Kerja Berpredikat WBBM**



25 Juli 2024

Perbincangan Kinerja Stakeholder (PENJOR)



30 Juli 2024

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran dan Monitoring Evaluasi Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2024



27 Agustus 2024

Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat atas Belanja Daerah





28 Agustus 2024

**Pembinaan UMKM Bumba
dan Tenun Endek**

13 September 2024

**Pemeriksaan Interim atas
LKPP 2024 oleh BPK RI**



19 September 2024

***Refreshment dan Konfirmasi
Aktivasi BNI Direct***

20 September 2024

***Kick Off Hari Oeang Republik
Indonesia***



29 September 2024

***Focus Group Discussion Data
Analytics***

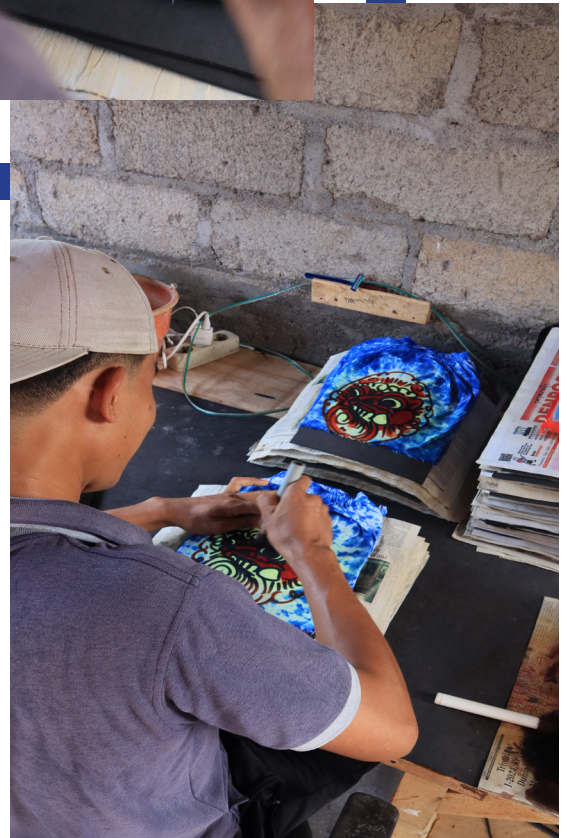
PUNAPI

UMi Barong Lukis Denpasar

Pada tahun 2024, program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) terus menjadi salah satu inisiatif penting pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi mikro. Program ini dirancang untuk memberikan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang belum terjangkau oleh sistem perbankan konvensional.

Salah satu penerima manfaat UMi yakni Ibu Galuh Setiari yang membangun bisnis garmen (industri pakaian dan tekstil) Barong Lukis “Bali Galuh” sejak tahun 2020 bersama dengan suaminya. Dari bisnis ini, Ibu Galuh juga menjadi salah satu pemasok baju barong ke salah satu pusat oleh-oleh di Denpasar.

Bersama dengan Koperasi CHM Cabang Denpasar, pembiayaan UMi untuk peningkatan modal usaha, pengembangan kapasitas produksi, dan peningkatan daya saing bisa disalurkan.



APBN

UMKM D'Bambu Bamboo Straw

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi ASEAN Treasury Forum (ATF). Salah satunya UMKM D'Bambu Bamboo Straw milik Bapak I Wayan Ari Marista berupa souvenir sedotan dan pena yang terbuat dari bambu.

Dalam rangka mendukung UMKM, pemerintah juga melakukan beberapa kebijakan pengurangan tarif dan kemudahan akses perdagangan lintas negara, memperluas pangsa pasar ekspor, serta pemanfaatan fasilitas pembiayaan lintas negara yang memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memperkuat struktur modal dan mengakses investasi asing, yang pada akhirnya mempercepat pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.

Melalui integrasi ini, UMKM tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga berkontribusi pada penguatan ekonomi kawasan ASEAN secara keseluruhan.



Menghadapi Tantangan *Next Treasury* Melalui Revitalisasi Tugas Unit Kepatuhan Internal

“ Revitalisasi tugas UKI merupakan strategi penting dalam membangun *next treasury* yang tangguh dan adaptif terhadap tantangan masa depan ”

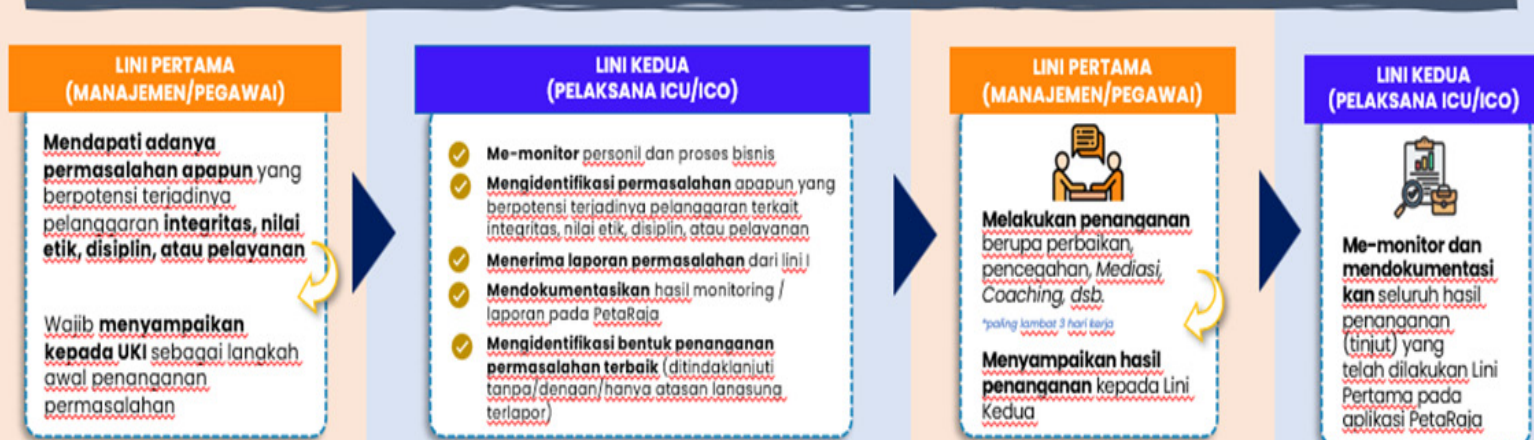
Dalam menghadapi dinamika dan tantangan dalam pengelolaan keuangan negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mengambil berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah dengan melakukan revitalisasi Unit Kepatuhan Internal (UKI) untuk memperkuat peran UKI dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara dengan tetap mengedepankan nilai integritas.

Revitalisasi UKI merupakan salah satu wujud implementasi Grand Design Kepatuhan Internal yang bertujuan untuk menajamkan tugas dan fungsi UKI agar selaras dengan perkembangan organisasi dan tantangan yang semakin kompleks. UKI memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kepatuhan proses bisnis organisasi, memastikan pengendalian internal berjalan dengan baik, serta melakukan pemantauan pelaksanaan mitigasi atas potensi risiko penyimpangan. Fokus utama dalam revitalisasi UKI ini meliputi dua aspek penting.

Pertama, yaitu melakukan mitigasi pelanggaran kode etik, integritas, dan layanan. UKI bertugas melakukan identifikasi dini terhadap berbagai pelanggaran terkait dengan kode etik, perilaku integritas, maupun layanan yang diberikan oleh organisasi kepada pihak eksternal. Proses ini meliputi peninjauan internal yang mendalam, baik dari hasil pengawasan maupun dari laporan pengaduan yang diterima.

Dalam upaya memperkuat mitigasi ini, salah satu strategi penting yang perlu diimplementasikan adalah membangun budaya saling jaga, listen up, speak up, dan keterbukaan di seluruh elemen unit organisasi guna mendorong setiap individu untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kepatuhan dan integritas. Pendekatan preventif dan persuasif juga diperlukan untuk mengurangi potensi pengaduan yang akan berpengaruh pada Indeks Integritas Unit (IIU). Respon cepat terhadap tindak lanjut hasil monitoring atas kejadian/pelanggaran yang terdeteksi juga diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap organisasi

ALUR



*) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan terkait integritas, nilai etik, disiplin, atau pelayanan yang telah terdapat tanda-tanda / potensi sebelumnya belum ditindaklanjuti dapat memengaruhi nilai IIU

) Pada aplikasi PetaRaja akan ada **histori tindak lanjut atas laporan atau monitoring permasalahan personil atau proses bisnis

Selanjutnya, sebelum dilaksanakan penataan struktur organisasi dan SDM, perlu dilakukan uji coba (piloting) program revitalisasi sesuai dengan alur di atas terhadap beberapa unit kerja. Uji coba ini bertujuan untuk menguji efektivitas pendekatan baru dalam mitigasi pelanggaran dan memastikan bahwa setiap perubahan yang diterapkan mampu memberikan hasil yang optimal bagi tata kelola dan kinerja organisasi.

Bentuk revitalisasi yang kedua, yaitu melaksanakan pemantauan berkala atas layanan, capaian, dan tata Kelola internal unit kerja. Pemantauan berkala ini berfungsi sebagai early warning system yang dapat mendeteksi potensi masalah organisasi. Dalam hal ini UKI bertanggung jawab untuk memantau kualitas layanan yang diberikan oleh unit kerja, termasuk memeriksa apakah layanan yang diberikan telah sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan.

Pemantauan terhadap capaian kinerja dan pengawasan tata kelola internal juga sangat penting untuk memastikan bahwa proses bisnis yang diterapkan telah sesuai dengan regulasi dan pedoman yang berlaku. Pemantauan berkala juga memungkinkan UKI untuk mendeteksi potensi terjadinya risiko dan mengambil langkah mitigasi yang diperlukan

ALUR



Pemantauan UKI juga berfungsi untuk meyakinkan manajemen bahwa unit kerja telah melaksanakan pengendalian internal yang efektif dan memastikan keberlanjutan prestasi unit organisasi yang telah diraih sebelumnya. Hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk perbaikan sistem dan proses bisnis secara berkelanjutan.

Revitalisasi tugas UKI merupakan strategi penting dalam membangun *next treasury* yang tangguh dan adaptif terhadap tantangan masa depan. Penguatan fungsi pengawasan, pengembangan SDM UKI, serta peran penting UKI dalam Shadow Organization menjadi pilar penting dalam menjaga akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan negara. Melalui upaya ini, diharapkan revitalisasi UKI dapat berdampak positif terhadap kinerja dalam pengelola keuangan negara dan mampu menghadirkan treasury yang lebih modern, transparan, akuntabel, dan berintegritas. (dev)



Reviu Pelaksanaan Anggaran KPPN Denpasar Periode Semester I Tahun 2024

Sebagai Kuasa BUN di daerah, tugas KPPN tidak hanya memastikan penyaluran anggaran berjalan dengan lancar sesuai dengan kewenangan dan SOP yang telah ditetapkan, tapi juga memantau dan berkordinasi dengan stakeholder agar tujuan belanja dapat tercapai baik dari sisi realisasi, output, juga outcome. Dari hasil monev dan koordinasi tersebut selama periode Semester I TA 2024, KPPN Denpasar telah mengidentifikasi empat tantangan utama pelaksanaan/eksekusi belanja yaitu tantangan perencanaan, tantangan pengadaan barang/jasa, tantangan eksekusi kegiatan, dan tantangan penyaluran belanja.

Tantangan Penyesuaian Rencana Belanja

Beberapa tantangan penyesuaian rencana belanja untuk meminimalisasi Deviasi RPD secara umum, antara lain:

1. Penyusunan RPD pada Halaman III DIPA sering kali dilakukan pada saat penyusunan kalender kegiatan satker oleh Tim Teknis belum final, sehingga akurasi penginputan RPD masih rendah.
 2. Kesulitan penentuan RPD untuk kegiatan – kegiatan yang sifatnya mendadak/mendesak, ketidakpastian waktu pelaksanaan kegiatan dan kegiatan yang tergantung pada pihak eksternal seperti terjadinya bencana, perkara, pengadaan konsumsi pasien, tahanan, dan lain-lain.
 3. Pengisian Nilai RPD belum diselaraskan dengan target penyerapan per triwulan, padahal tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan sepanjang tahun tetapi ada juga yang pada periode – periode tertentu.
- Terdapat Pagu Blokir di satker namun belum dapat segera direvisi.

Tantangan Pengadaan Barang dan Jasa

Beberapa tantangan dalam rangka pengadaan Barang/Jasa yang mengakibatkan kontrak tidak terjadi perikatan di TW I secara umum adalah:

1. Dibeberapa Satker pagu 53 masih mengalami pemblokiran atau terkena *Automatic Adjustment* sehingga satker tidak bisa melakukan kegiatan

“

Terdapat empat tantangan utama pelaksanaan belanja yaitu tantangan perencanaan, tantangan pengadaan barang/jasa, tantangan eksekusi kegiatan, dan tantangan penyaluran belanja.

”

sampai dengan dibukanya blokir pagu tersebut. -Dibeberapa satker terkendala karena gagal lelang, sehingga harus melakukan proses ulang dari awal, hal ini memakan waktu yang tidak sebentar.

2. Beberapa Satker mempunyai tren dari tahun ke tahun mendapat tambahan pagu di TW IV otomatis kegiatan atau kontrak baru bisa dilakukan setelah terdapat pagu.

Tantangan Eksekusi Kegiatan dan Penyaluran Belanja

1. Tantangan belanja rutin seperti adanya pemadanan NIK dengan NPWP, implementasi TTE tahap III B dan III C, serta perhitungan tunjangan kinerja dengan menggunakan gaji web.
2. Tantangan belanja infrastruktur dan/atau belanja dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa misalnya karenanya pembatalan pemenang tender, kendala kondisi lapangan, dan lain-lain.
3. Tantangan penyaluran belanja bantuan sosial dan bantuan pemerintah yang disebabkan karena tingginya Retur SP2D.
4. Tantangan belanja untuk aktivitas pelayanan dan untuk pelaksanaan tugas fungsi satker seperti terjadinya kelangkaan benih pada Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dan lain-lain.

KPPN Denpasar telah mengidentifikasi kendala dan tantangan proses pelaksanaan belanja selama Semester I Tahun 2024 sebagai evaluasi untuk rencana pengawalan akhir tahun 2024 dan persiapan TA 2025. Adapun evaluasi tersebut, antara lain:

1. Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran yang Tidak Optimal

Untuk memastikan bahwa setiap K/L mengeksekusi tiap belanja APBN berdasarkan konsep *value for money* maka diperlukan instrument yang memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran, yaitu melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 dari 8 Indikator terdapat 3 Indikator yang memerlukan perhatian khusus yaitu Indikator Penyerapan Anggaran, Deviasi Halaman III DIPA, dan Capaian Output. Untuk mengawal peningkatan ketiga indikator tersebut secara maksimal, KPPN Denpasar melakukan langkah-langkah monitoring dan evaluasi khususnya kepada satuan kerja dengan capaian IKPA yang belum maksimal dengan melakukan kegiatan *Monev* ke Satker dan Kegiatan *Penjor*

2. Penolakan SPM karena kesalahan uraian dan kesalahan lampiran SPM.

Salah satu kendala dalam pelaksanaan anggaran adalah adanya penolakan SPM oleh KPPN karena kesalahan uraian SPM dan kesalahan lampiran SPM. Data penolakan SPM pada bulan Januari 2024 pada KPPN Denpasar cukup tinggi. Hal ini mendasari diterbitkan surat Kepala KPPN Denpasar nomor S- 375/KPN.2201/2024 tanggal 15 Februari 2024 hal Penegasan Kembali Terkait Penulisan Uraian dan Dokumen Pendukung SPM.

3. Satker terlambat mengajukan SPM, pendaftaran/addendum kontrak, dan permohonan TUP. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran pada akhir tahun anggaran 2023 masih terdapat satker yang terlambat mengajukan SPM, pendaftaran kontrak/addendum kontrak dan Permohonan TUP.

4. Pagu minus Belanja Pegawai.

Dari monitoring pagu minus belanja pegawai pada aplikasi OM-SPAN terdapat 12 satuan kerja yang pagu anggaran pegawainya sudah minus dengan total minus Rp20.380.174.869,- s.d. periode Semester I 2024 yang dikhawatirkan akan terus bertambah apabila satker tersebut tidak segera melakukan Revisi DIPA. Untuk menghindari pagu minus sampai dengan akhir tahun anggaran KPPN Denpasar akan melakukan *monev* Pagu Minus Belanja Pegawai dan akan mengkoordinasikan ke Satker terkait untuk segera melakukan koordinasi dengan unit di atasnya untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai tersebut melalui Revisi DIPA.

5. Deviasi Scheduled Payment Date (SPD)

SPD terbentuk secara otomatis saat SPP divalidasi untuk jatuh tempo 5 hari kerja dan ter-update menjadi 2 hari kerja saat SPM divalidasi. Apabila SPP/SPM tersebut tidak jadi diajukan atau tertolak oleh KPPN dan jika melebihi tanggal jatuh tempo belum diajukan kembali atau dihapus, akan menyebabkan deviasi. Deviasi SPD terjadi karena kurangnya perhatian satker atas SPP/SPM yang tidak jadi diajukan ke KPPN atau tertolak oleh KPPN, tetapi tidak segera ditindaklanjuti oleh satker. Hal-hal yang menyebabkan deviasi SPD antara lain:

- Satker tidak memvalidasi ulang SPM yang tertolak KPPN;
- Satker tidak segera menghapus SPP yang tertolak atau yang tidak jadi diajukan;
- Satker terlambat mengirim SPM ke KPPN (OTP lebih dari pukul 12.00 pada tanggal SPD).

6. Standarisasi Kompetensi Pejabat Pengelola Perbendaharaan. Sesuai dengan PMK Nomor 62 Tahun 2023 Standar Kompetensi bagi PPK dan PPSPM dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi. Sampai dengan periode Semester I Tahun 2024 pada KPPN Denpasar, PPK yang sudah bersertifikat PNT sebanyak 61,02% sedangkan PPSPM bersertifikat SNT sebanyak 55,40%

7. Belum optimalnya penggunaan Internet Banking Governance / CMS pada satuan kerja. Modernisasi pengelolaan keuangan negara khususnya dalam pengelolaan Uang Persediaan (UP) oleh Bendahara Pengeluaran salah satunya adalah dengan penggunaan Internet Banking Governance/CMS. Penggunaan CMS ini juga dalam rangka mendukung program Gerakan Nasional Non Tunai (cashless). Sampai dengan 30 Juni 2024 baru 65,52% Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja lingkup KPPN Denpasar yang sudah menggunakan CMS. (mpn)



Platform Pembayaran Pemerintah

Perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi yang serba digital mendorong transformasi perubahan dalam tata Kelola pemerintahan, Ditjen Perbendaharaan yang merupakan bagian dari Institusi Pemerintah dalam lingkup Kementerian Keuangan turut melaksanakan Transformasi Teknologi dalam pelaksanaan tugasnya dibidang Keuangan Negara baik dari sisi tata kelola penerimaan negara maupun tata kelola pengeluaran negara.

Ditjen Perbendaharaan yang salah satu misinya adalah mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efisien dan optimal terus mengembangkan system pengelolaan keuangan negara dengan mengikuti perkembangan teknologi. Sejak pembentukan Ditjen Perbendaharaan melalui paket Undang-undang Keuangan Negara pada tahun 2004 perkembangan teknologi selalu mengiringi perjalanan Ditjen Perbendaharaan dalam melayani stakeholders.

Pada awal perjalanan Ditjen Perbendaharaan tahun 2005 diluncurkan aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM) untuk satuan kerja dalam pengajuan tagihan kepada Negara, kemudian seiring dengan kebutuhan pengelolaan anggaran yang lebih akurat di tahun 2014 diluncurkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang merupakan aplikasi pertama Ditjen Perbendaharaan yang menggunkan data base tunggal (single data base) dan ditahun 2022 dilaksanakan role out Aplikasi SAKTI untuk seluruh satuan kerja untuk melakukan penagihan kepada negara dan sekaligus sebagai sarana dalam penyusunan laporan keuangan.

Tidak hanya dalam system pelaksanaan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran saja Ditjen Perbendaharaan juga mengembangkan system pembayaran yang lebih moderen diantaranya penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, Digitalisasi Pembayaran melalui Virtual Account (VA) dan pembayaran terjadwal melalui Platform Pembayaran Pemerintah (PPP). Dengan penggunaan PPP memudahkan Pemerintah dalam penyediaan kas untuk pembayaran tagihan negara dan bagi pemilik tagihan (Vendor) akan mendapat kepastian kapan pembayaran diterima (schedule payment date) dan kemudahan dalam memonitoring posisi tagihannya.

Platform Pembayaran Pemerintah adalah interkoneksi system antara system inti (core system) yang dimiliki Ditjen Perbendaharaan dengan system pendukung baik yang dikelola Ditjen Perbendaharaan, Eselon I lain di Kemenkeu maupun system yang dikelola oleh Kementerian lain diluar Kemenkeu serta system mitra yang dimiliki pihak ketiga baik vendor maupun perbankan, dalam rangka pelaksanaan pembayaran pemerintah.

Sistem inti pada PPP adalah system yang dimiliki dan dikelola Ditjen Perbendaharaan yang merupakan system utama untuk pelaksanaan pembayaran diantaranya SPAN, SAKTI dan Gaji Web KPPN. Sedangkan system pendukung diantaranya adalah Aplikasi HRIS, Digipay Satu, e-Peradin, e-Procurement, dan Aplikasi Bansos. Sedangkan system mitra yang sudah bergabung dalam PPP diantaranya PLN, Telkom, dan Bank Penerbit KKP.

Tagihan negara yang sudah diproses melalui PPP saat ini

“Simplikasi proses, transparansi pembayaran dan efektifitas pelaksanaan tugas adalah tersedianya data terkait belanja pemerintah dengan sangat rinci”

adalah Pembayaran Gaji (Gaji Induk PNS, PPPK dan PPNPN), Pembayaran Tunkin, Uang Makan dan Uang Lembur serta Common Expenses (Pembayaran Tagihan Listrik PLN dan Langanan Telepon/Internet PT. Telkom). Rencana perluasan PPP yang sedang dikembangkan adalah pembayaran Perjalanan Dinas melalui aplikasi e-Perjadin, pembayaran pengadaan sederhana melalui Government Marketplace (Aplikasi Govmart di ekatalog LKPP) serta pembayaran Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah.

Manfaat dari PPP antara lain adalah simplikasi proses karena seluruh proses baik pengunduhan tagihan maupun proses pembayaran dilakukan melalui aplikasi SAKTI dengan memanfaatkan data dari pihak mitra maupun system pendukung, selain itu seluruh proses juga transparan karena dapat dimonitoring sampai mana proses pembayarannya dan juga bagi pemerintah memudahkan dalam perencanaan kas dengan Scheduled Payment Date (SPD) dan bagi mitra mendapat kepastian pembayaran yang membantu manajemen kas sedangkan bagi satker dengan proses melalui



SAKTI dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dengan mengurangi pekerjaan yang bersifat administrative.

Manfaat lain dari implementasi PPP selain simplikasi proses, transparansi pembayaran dan efektifitas pelaksanaan tugas adalah tersedianya data terkait belanja pemerintah dengan sangat rinci untuk keperluan analisis dan pengolahan data untuk berbagai keperluan. Dengan berbagai manfaat diatas penerapan PPP akan terus dilakukan dan yang akan segera di implementasikan adalah perluasan piloting common expanses ke seluruh satker, Perluasan piloting pembayaran Tukin, uang makan, uang lembur ke seluruh satker Kemenkeu, Piloting e-Perjadin untuk seluruh satker Kemenkeu, Piloting Pengadaan Sederhana untuk seluruh satker Kemenkeu dan Piloting penyaluran Bansos dan Banper pada K/L pengelola Bansos dan Banper. (bay)





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DJPb
Indonesian Treasury



INDONESIAN
TREASURY

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DENPASAR



DUKUNG KPPN DENPASAR UNTUK TERUS MENJAGA KEBERLANJUTAN PREDIKAT ZONA INTEGRITAS WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DAN ISO 37001:2016 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

**SELURUH LAYANAN KPPN DENPASAR
TIDAK DIPUNGUT BIAYA
“TOLAK DAN LAPOR GRATIFIKASI”**

Layanan Pengaduan



wise.kemenkeu.go.id



pengaduandjpb.kemenkeu.go.id



lapor.go.id



08113999037



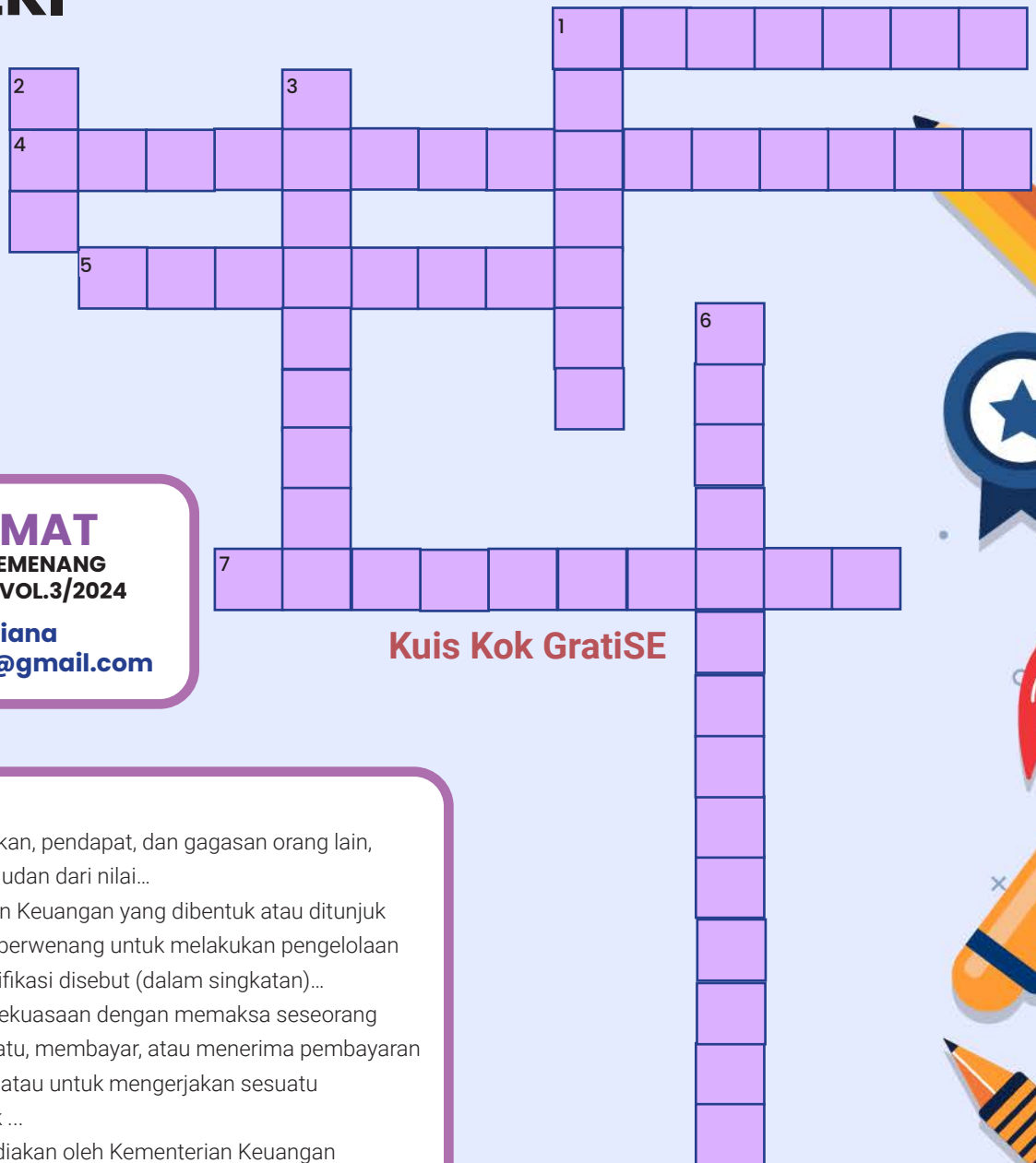
email : kepatuhan.internal037@gmail.com



<https://bit.ly/ORAHIN037>

djpb.kemenkeu.go.id/kppn/denpasar/id/

TEKA-TEKI SILANG



SELAMAT
KEPADA PEMENANG
KECAK BALI VOL.3/2024

Kak Istiana
psapd.jateng@gmail.com

Kuis Kok GratiSE

Menurun

1. Menghargai masukan, pendapat, dan gagasan orang lain, merupakan perwujudan dari nilai...
2. Unit di Kementerian Keuangan yang dibentuk atau ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan pengendalian Gratifikasi disebut (dalam singkatan)...
3. Penyalahgunaan kekuasaan dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu merupakan bentuk ...
6. Aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia disebut ... system

Mendatar

1. Pegawai dan Penyelenggaran Negara yang menolak atau menerima Gratifikasi wajib menyampaikan laporan penolakan atau penerimaan Gratifikasi kepada UPG dalam jangka waktu paling lama ... hari kerja sejak tanggal penolakan atau penerimaan Gratifikasi
4. Menjaga informasi dan data Kementerian Keuangan yang bersifat rahasia termasuk dalam butir Kode Etik dan Kode Perilaku Kementerian Keuangan Nilai ...
5. Hari Anti Korupsi Sedunia diperingati setiap tanggal 9 pada bulan ...
7. Menerima uang dari Satuan Kerja pada saat melakukan penugasan termasuk pelanggaran terhadap nilai-nilai Kementerian Keuangan ...

Syarat dan Ketentuan

1. Kirim jawaban Anda berupa foto halaman Kuis Cari Kata ke alamat email kecakbali.037@gmail.com dengan subyek LOMBATTSKECAK Vol. 4/2024.
2. Jawaban disertai data diri berupa nama, nomor telepon, alamat dan email.
3. Jawaban paling lambat diterima pada pukul 23.59 WIB Tanggal 31 Desember 2024.
4. Nama pemenang akan diumumkan pada Majalah Kecak Bali edisi berikutnya.
5. Hadiah dikirim ke alamat pemenang sesuai alamat yang diberikan dan konfirmasi melalui telepon.



Trimo Yulianto
Penanggung Jawab



Totok Iman Santoso
Pimpinan Redaksi



Made Pradnyaniti
Kontributor



Nadhelia Sesar Tasya S.
Kontributor



Embun Nurani Wulandari
Layout dan Desain



Devika Yulan Saputri
Kontributor

MEET THE TEAM



Untea Amalia Cahyadi
Kontributor



Aveda Astyayustina
Kontributor



Bayu Wijayanto
Kontributor



Galuh Ajeng Aulia Putri
Kontributor



Adella Gysta Aviera Putri
Kontributor



Intan Radha Hasyiah
Kontributor